

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa

Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Padakembang disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistematika perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah da
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 14. Peraturan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 .1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021` tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
6. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 002 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Padakembang Tahun 2025;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Padakembang pada Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Padakembang Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Padakembang dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kcamatan Padakembang Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II :	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4	Review terhadap Rancangan RKPD.
2.5	Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III :	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
BAB IV :	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV :	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PADAKEMBANG
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padakembang Tahun 2023, Tahun berjalan 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Padakembang

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Padakembang, Tahun 2021-2026, tujuan Kecamatan Padakembang adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran kinerja Kecamatan Padakembang yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Padakembang;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Padakembang;
3. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Padakembang.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Padakembang pada tahun 2021 dan tahun 2022 melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan diimplementasikan dalam 20 bentuk sub kegiatan, Tahun 2023 melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 17 kegiatan dan diimplementasikan dalam 20 bentuk sub kegiatan, Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Padakembang Tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PADAKEMBANG DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KECAMATAN PADAKEMBANG SD. TAHUN 2024 KABUPATEN TASIKMALAY

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
7														
7	01													
7	01	01												
7	01	01	2	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang	N/A	-	59	-	0%	61	63	0,00
7	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	11	11	11	100,00	12	12	109,9%
7	01	001	2	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum								

7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
7	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	001	2.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor								
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	0	0	0,00	0	0	0,00
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	-	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	-	12	12	100,00	12	36	60,00
7	01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56	-	9	9	100,00	10	26	0,00
7	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	-	0	0	0,00	0	0	0,00
7	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	12	2	2	2	100,00	2	8	0,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang	81,50	0	81,15	81,91	100,93	81,20	81,55	100,07
7	01	02	2	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	8	4	4	100,00	4	20	80,00
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24	4	4	4	100,00	4	20	0,00
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	2	1	1	100,00	4	4	80,00
7	01	002	2	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00

7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
7	01	002	2	04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24	8	4	4	4,00	4	20	0,00
7	01	003	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	100,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
7	01	003	2.01	-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	12	-	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	0,00
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	004	2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10		5	5	100,00	5	10	100,00
7	01	004	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	100,00		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24	4	4	4	100,00	4	20	80,00
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100,00							
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00							

7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100,00		100,00						
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	N/A	N/A	100,00						
7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00

7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30	5	5	5	100,00	5	25	80,00
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	30	5	5	5	100,00	5	25	80,00

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Padakembang sampai dengan Tahun 2024 adalah ;

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 59, tidak tercapai, karena tidak ada penilaian dari Inspektorat.
2. Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - g. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - h. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- i. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - j. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang, yaitu realisasi Tahun 2024 sebesar 82,09 poin dari target 81,55 poin atau sebesar 101,09%, bila dibandingkan akhir tahun Renstra sebesar 100%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :
- a) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah
 - Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut karena tidak dianggarkan dalam RKA Kecamatan Padakembang;
 - Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.
 - b) Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :
 - Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Padakembang sudah terpenuhi target kinerjanya walaupun tidak dianggarkan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dan wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah;
 - Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - c) Faktor-faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator nilai IKM adalah karena semakin

meningkatnya kinerja aparatur kecamatan Padakembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
 - a) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel;
 - b) Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padakembang

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Padakembang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel. 2.2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADAKEMBANG KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Indikator Kinerja (IKU/SPM/IKK/SDG'S)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang	POIN	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	0	60,50	60,60	61,50	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang	POIN	81,15	81,20	81,34	81,50	0	81,21	81,35	81,55	
3	Persentase peningkatan Status Desa	-	N/A	N/A	20%	20%	0	20%	20%	20%	
4	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 indikator yaitu :

- a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang;
 - Faktor pendorong:
meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur Kecamatan dan tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan (SP).
 - Faktor penghambat:
SDM pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan anggaran untuk penyediaan / pengadaan sarana dan prasarana pelayanan.
- b) Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;
 - Faktor pendorong:
Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, masyarakat dan unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparatur dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.
 - Faktor penghambat:
SDM aparatur dan masyarakat yang kurang cepat tanggap / apriori terhadap setiap kejadian gangguan di lingkungan sekitarnya.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban serta sosialisasi cepat tanggap darurat kepada masyarakat dalam menghadapi setiap kejadian gangguan di lingkungannya.
- c) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - Faktor pendorong:
Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.

- Faktor penghambat:
 - Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.
 - Rekomendasi :
 - Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
- d) Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- Faktor pendorong:
 - Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.
 - Faktor penghambat:
 - Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta dalam penyusunan pelaporan yang sering terlambat.
 - Rekomendasi :
 - Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparaturnya perangkat desa.
2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 2 indikator yaitu :
- a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang, hal ini disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
 - b) Persentase Peran Masyarakat Dalam Pembangunan belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.

2.3 Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Padakembang

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Padakembang dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padakembang sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Padakembang dari 5 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu:
 - a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang tidak tercapai karena disebabkan karena belum dilaksanakannya penilaian SAKIP Kecamatan oleh Inspektorat.
 - b) Persentase peningkatan Status Desa tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUAPPAS, sehingga tidak ada kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padakembang, antara lain :

Sekretariat

- a. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Padakembang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;

Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana;
- d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan,

Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Padakembang;
- c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Padakembang

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
- e. Lambatnya aparatur Desa dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal;
Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :
 - a. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Padakembang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
- d. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Padakembang terdapat penambahan, pengurangan dan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan. Adapun hasil telaah terhadap RKPD per program, per kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN TASIKMALAYA

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN			-	2.124.405.818					2.255.600.000	
	KECAMATAN			-	2.124.405.818	KECAMATAN	-		-	2.255.600.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Padakembang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang	60,50 (C)	1.678.246.318	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Padakembang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang	60,50 (C)	2.002.100.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100%	1.678.246.318	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100%	1.750.000.000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.678.246.318	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.750.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	76.109.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	51.600.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	41.095.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	21.514.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	8.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	8.300.000	
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	62..800.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	47.500.000	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	18.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	18.500.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	44.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	44.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	62.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	92.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	48.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	71.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 unit	14.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2 unit	21.000.000	

							Lainnya yang Dipelihara			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Padakembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	58.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Padakembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	25.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	15.000.000

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5	15.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	17.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	100%		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	100%		

3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Padakembang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	135.250.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Padakembang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	135.250.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum			
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 laporan	135.250.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 laporan	135.250.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Padakembang	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	25.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Padakembang	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	25.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan			

								sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	25.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	32.000.000	

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Padakembang	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	27.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Padakembang	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	27.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100%		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100%		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 dokumen	12.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 dokumen	13.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 dokumen	15.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 dokumen	16.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh kecamatan padakembang.

Namun dalam proses ini kecamatan Padakembang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengkomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh kecamatan Padakembang terhadap seluruh perangkat daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten. Adapun usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 dari para Pemangku Kepentingan Kabupaten sebagaimana tabel 2.5.

Tabel 2.5.

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PADAKEMBANG

1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah sehingga diharapkan program dan kegiatan perangkat daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi. Telaahan kebijakan nasional dikaitkan dengan RPJMD 2025.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Padakembang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Padakembang melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padakembang tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2.1

Prioritas dan Sasaran Kecamatan Padakembang

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (outcome)
	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahandan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Padakembang	Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Padakembang	Nilai Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang					
Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Sesuai Ketentuan					
Meningkatnya Profesionalitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Padakembang				Presentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti Presentase Penyelenggaraan Pemerintah Umum Presentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	

Tabel 3.2.2
Tujuan Kecamatan Padakembang

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Repormasi Birokrasi kecamatan Padakembang	60 (CC)

Tabel 3.2.3.
Sasaran Kecamatan Padakembang

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
1	Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah Kecamatan Padakembang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang	61,50 (CC)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Padakembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang	81,55
3	Meningkatnya Kondusipitas di wilayah kecamatan padakembang	persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%
		persentase potensi dan kejadian konplik yang tertangani	100%
		persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang undangan	100%

Tabel 3.2.3**Sasaran Kecamatan Padakembang**

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah Kecamatan Padakembang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang	60,55 CC
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Padakembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang	81,55 Poin
3	Meningkatnya Kondusifitas di wilayah kecamatan padakembang	persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%
		persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang undangan	100%

Dari Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Serta Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padakembang tersebut diatas diharapkan Fungsi Kecamatan Padakembang dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan semakin Optimal, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya dapat Terwujud .

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Padakembang tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun program dan kegiatan dalam perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Padakembang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

Sasaran dan Program/Kegiatan Kecamatan Padakembang

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan
1	2	3
1	Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah Kecamatan Padakembang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Padakembang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Meningkatnya Kondusipitas di wilayah kecamatan padakembang	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 4.1.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Ket
		KECAMATAN PADAKEMBANG	2.124.406.818,00	
	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.678.246.818,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.109.500,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.800.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.800.000,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000,00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.000.000,00	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18.000.000,00	

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	135.250.000,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
		Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	27.000.000,00	

Tabel 4.1.3

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PADA KEMBANG TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN TASEK MALAYA**

Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Unit Penanggung Jawab	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	PADAKEMBANG								2.124.406.818		-				
	UNSUR KEWILAYAHAN								2.124.406.818		-				
	KECAMATAN								2.124.406.818		-				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kecamatan			Kec.padakem bang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kecamatan	-	2.124.406.818	DAU	-	Nilai Akuntabilita s Kinerja Pemerintah (AKIP) Kecamatan		2.255.870.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggung jawaban Keuangan yang sesuai aturan					Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.678.246.318	DAU	-	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	14	1.650.320.038	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang enerima Gaji dan Tunjangan	11 orang			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.678.246.318		-	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	13 Orang/ Bulan	1.650.320.038	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum					Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	41.095.500		-	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	21.514.000			Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	7.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan			Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.000.000		-	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	8.400.000			Jumlah laporan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan %	8.400.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor			
	Pengadaan Mebel		Jumlah unit Mebel yang disediakan	100 Uit			Pengadaan Mebel	100 unit	20.000.000			Jumlah unit Mebel yang disediakan	100 unit	21000000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	4 unit			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	26.800.000			Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	26.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentas Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daearh	100%				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	60.800.000		-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	61.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	2 laporan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 laporan	18.000.000			Jumlah laporan jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	2 laporan	18.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 laporan	42.800.000			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	44.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah bDaerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	69.426.500.		-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan yang dibayarkan Pajaknya	8 unit	71.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	2 unit			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	20.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	21.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			Kec. Padakembang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			DAU	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	5 laporan			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	15.000.000			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	15.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit perangkat Daerah yang ada di kecamatan					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit perangkat			

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	5 laporan			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		20.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	5 laporan	60.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			Kec.padakembang		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			DAU	-	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum			Kec,Padakembang		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			DAU	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	5 laporan			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		171.850.000		-	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	5 laporan	75.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang tertangani			Kec.padakembang		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			DAU	-	Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang tertangani			

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia		jumlah orang yang mengikuti Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	150 orang			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	150 orang	30.000.000		-	jumlah orang yang mengikuti Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	150 orang	32.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan			Kec.padakembang	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				DAU	-	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Telah memperoleh Pembinaan dan Pengawasan				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					-	Persentase Desa yang Telah memperoleh Pembinaan dan Pengawasan			

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang dipasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 dokumen			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 dokumen	12.000.000			Jumlah Dokumen yang dipasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	5 dokumen	13.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 dokumen			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 dokumen	15.000.000			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 dokumen	16.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padakembang tahun Anggaran 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Padakembang Tahun 2025. Kecamatan Padakembang sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padakembang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Padakembang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Padakembang yang telah dirumuskan dan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Padakembang. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Padakembang.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu :

“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Padakembang, 11 Agustus 2024

Camat Padakembang



The image shows a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to read "Agianto Ahmad Tahir".

AGIANTO AHMAD TAHIR,S.STP, MSi

NIP. 198308112002121001